



# Maksimalkan PAD Mempawah

**MEMPAWAH** -- Fraksi Demokrat DPRD Mempawah menyuarakan peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang dinilai masih belum maksimal. Menurut Fraksi Demokrat masih banyak potensi pajak yang belum dioptimalkan oleh OPD terkait.

"PAD harus terus digali dan semua program pembangunan dalam rencana kerja harus bersifat merata sehingga dapat menampung semua aspirasi masyarakat di Kabupaten Mempawah," tegasnya.

Senada itu, Fraksi PKB minta agar upaya peningkatan PAD lebih dikembangkan lagi. Sebab, pihaknya menilai masih banyak sumber pendapatan baru yang masih bisa dioptimalkan untuk mendongkrak sektor PAD.

"Pembiayaan pembangunan daerah masih mengandalkan dana konvensional seperti pajak dan retribusi. Maka, pemerintah daerah perlu meningkatkan PAD dalam mengatasi keterbatasan dana pembangunan," usulnya.

Kemudian, Fraksi PKB melihat adanya tuntutan rehabilitasi jalan menjadi gambaran bahwa infrastruktur jalan sangat penting dalam kehidupan masyarakat. Maka diperlukan komitmen dan keseriusan Pemda Mempawah untuk memenuhi aspirasi masyarakat.

"Sadaniang ditetapkan dalam program KPPN, namun bukan berarti Pemda Mempawah lepas tanggungjawab. Pembangunan dan peningkatan perekonomian serta kesejahteraan masyarakat yang be-



FOTO : HUMAS DPRD

**APBD** : Penyerahan pandangan akhir salah satu fraksi ke Ketua DPRD terhadap Raperda APBD TA 2023 di Gedung DPRD Mempawah.

lum tersentuh," sebutnya.

Fraksi Golkar minta agar usulan, saran serta pendapat Banggar DPRD menjadi bahan pertimbangan dalam pengambilan keputusan, dan dapat terakomodirnya kesepakatan antara tim anggaran kedua pihak.

"Fraksi Golkar minta kepada Bupati Mempawah supaya mengembalikan program infrastruktur jalan dan drainase dari PUPR ke Dinas Perkimtan sesuai tupoksi SKPD yang telah ditetapkan Bupati," desak Juru Bicara Fraksi Golkar.

Fraksi PDI Perjuangan menilai pengelolaan keuangan daerah yang baik dan berkualitas tak hanya bertumpu dan taat pada aturan yang berlaku, namun asas serta filosofi kebijakan politik anggaran yang berpihak pada kepentingan masyarakat Kabupaten Mempawah sangat penting.

"Penambahan belanja daerah

harus difokuskan pada kebutuhan aktual dan strategis seperti bidang pendidikan, kesehatan, perbaikan ekonomi, pertanian, perikanan, kelautan hingga pengentasan kemiskinan," harapnya.

Sementara itu, Juru Bicara Fraksi Hanura DPRD Mempawah, Chairussaib mengapresiasi dan berterimakasih kepada Badan Anggaran (Banggar) Legislatif dan Eksekutif yang telah membahas APBD 2023 secara maraton.

"Semoga apa yang dilakukan ini dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Mempawah. Memperhatikan Perbup 30/2022, KUA PPAS dan Raperda APBD TA 2023 serta Peraturan Mendagri maka Fraksi Hanura menerima dan menyetujui Raperda APBD TA 2023 untuk ditetapkan menjadi Perda," tandasnya. *(wah/Humas DPRD)*